

Ringkasan Eksekutif
Survei Tahap Ketiga
Monitoring Iklim Investasi di Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Survei Tahap Ketiga Monitoring Iklim Investasi di Indonesia

1. Pendahuluan

LPEM FEUI bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Bank Dunia telah melakukan serangkaian survei Monitoring Iklim Investasi di 5 kota besar Indonesia yaitu Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Makasar dan sekitarnya pada periode 2005-2006. Untuk fase pertama dilakukan pada pertengahan 2005, akhir 2005 fase kedua dan pertengahan 2006 untuk fase ketiga. Tujuan dilakukannya survei adalah untuk melihat perubahan terkait dengan iklim investasi di Indonesia dengan memperhatikan beberapa indikator iklim investasi tertentu dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah untuk melihat efektivitas kebijakan yang sudah dijalankan dan memperbaikinya agar iklim investasi di Indonesia semakin kondusif untuk kalangan bisnis.

Survei tahap ketiga ini menghasilkan beberapa temuan menarik berkaitan dengan iklim investasi. Adapun indikator-indikator yang disorot dari temuan-temuan tersebut, meliputi (1) hambatan dalam bisnis, (2) *import clearance*, (3) perpajakan (4) korupsi, dan (5) waktu yang diperlukan untuk memulai usaha, (6) tenaga kerja dan (7) infrastruktur.

a. Hambatan dalam Menjalankan Usaha

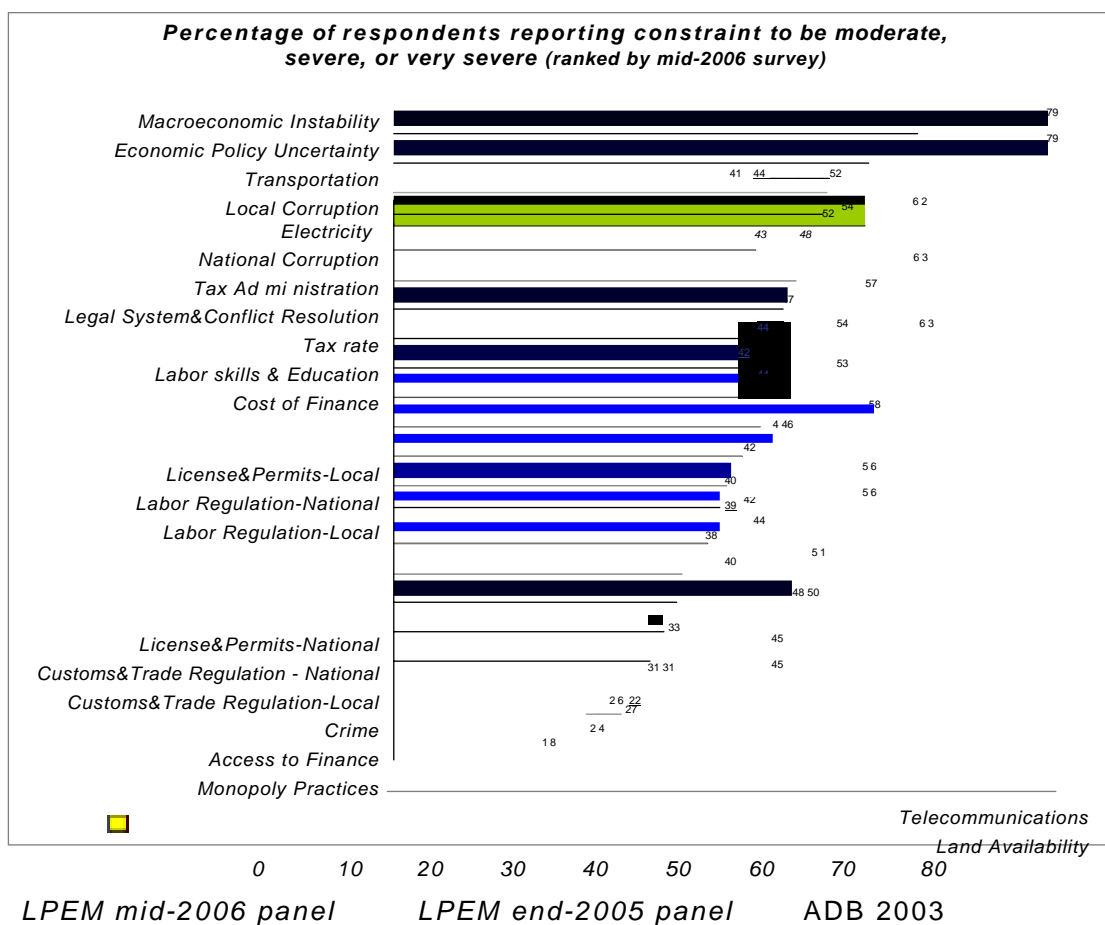
Secara umum, persepsi perusahaan tentang iklim investasi pada survei fase ketiga pertengahan 2006 membaik dibanding survei yang pertama kali dilakukan Bank Dunia dan ADB di tahun 2003. Namun, menurut responden tidak ada perubahan yang berarti jika dilihat dari peringkat hambatan dalam berinvestasi di Indonesia. Stabilitas makroekonomi, ketidakpastian kebijakan ekonomi, dan korupsi masih dianggap sebagai hambatan terbesar.

Survei ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur khususnya transportasi dan listrik dianggap memiliki derajat hambatan yang sama dengan permasalahan korupsi di dalam melakukan aktivitas bisnis. Hambatan lainnya adalah sistem hukum,

perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, permodalan, bea cukai dan kebijakan perdagangan, dan masalah perijinan.

Jika dibanding survei 2003 dan pertengahan 2006, maka terjadi perbaikan yang cukup signifikan untuk seluruh hambatan kecuali transportasi dan listrik, sedang pada rentang akhir 2005 dan pertengahan 2006 perusahaan menganggap bahwa hanya terjadi sedikit perbaikan dalam hambatan secara keseluruhan. Indikator makro seperti stabilitas makroekonomi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi membaik, seperti halnya korupsi dan regulasi perdagangan. Tekanan pada perekonomian pada akhir 2005 terlihat sedikit berkurang meski kesemuanya masih dianggap sebagai hambatan terbesar oleh dunia bisnis. Secara lengkap hambatan yang dihadapi dunia usaha menurut persepsi perusahaan adalah sebagai berikut (**Gambar 1**).

Gambar 1. Hambatan dalam Berusaha



Survei ini juga menyatakan bahwa persoalan transportasi dan listrik secara relatif masih dianggap sebagai hambatan yang besar dibanding survei akhir 2005, dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada akhir 2005, barangkali turut menyebabkan kondisi ini.

b. *Import Clearance*

Waktu yang Diperlukan untuk *Customs Clearance*

Proses *customs clearance* dimulai dari kapal sandar hingga barang dikeluarkan dari wilayah pelabuhan. Waktu *clearance* diukur terpisah antara proses ekspor dengan impor, berdasar jalur merah (melalui pemeriksaan fisik) dan jalur hijau (tidak perlu pemeriksaan fisik).

Dari survei, rata-rata waktu yang diperlukan untuk jalur merah adalah 6,4 hari atau meningkat dari 3,6 hari disurvei terdahulu, sedang jalur hijau 3,6 hari meningkat dari 2,3 hari pada survei sebelumnya.¹ Namun, jika yang dihitung adalah waktu yang dijumlahkan untuk tiap proses dalam *import clearance*, terlihat bahwa baik jalur merah maupun jalur hijau mengalami perbaikan, yaitu dari 7,6 hari (survei tahap dua) menjadi 7,3 hari untuk jalur merah, sedang jalur hijau dari 6,1 hari (survei tahap dua) menjadi 4,5 hari.

Biaya Tambahan untuk Mempercepat Proses *Import Clearance* (Frekuensi dan Biaya)

Dari 420 responden yang menyatakan pernah berhubungan dengan bea cukai, 87 persen mengakui memberikan biaya tambahan kepada petugas bea cukai. Sementara, persentase perusahaan yang menyatakan “sering” memberikan biaya tambahan menurun dari 47% menjadi 45%, tetapi persentase yang menyatakan “kadang-kadang” memberikan biaya tambahan meningkat dari survei sebelumnya yaitu dari 38% menjadi 43%.

Secara keseluruhan, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk proses *import clearance* adalah 2,1 persen dari total nilai impor/ekspor, menurun dari 2,7 persen pada survei yang kedua. Hal ini mungkin yang menyebabkan mengapa persepsi yang

¹Waktu (hari) yang diperlukan untuk proses *clearance* dihitung berdasar nilai “median”

berdasar pertanyaan tentang bea cukai dan regulasi perdagangan menunjukkan perbaikan.

Sementara itu, dilihat dari indikator frekuensi pertemuan dengan petugas Bea Cukai, 46 persen responden menyatakan bertemu dengan pernah petugas. Dibandingkan dengan survei dua survei sebelumnya, hasil survei tahap ketiga menunjukkan peningkatan dalam kontak dengan petugas. Dalam survei tahap kedua, nilai rata-rata pertemuan adalah 2,83 sedang median adalah 1. Namun, dalam survei tahap ketiga rata-rata pertemuan adalah 6,1 sedang mediannya 2. Berdasar temuan ini, hal yang menarik adalah ternyata meningkatnya frekuensi pertemuan dengan petugas tidak serta merta diikuti dengan meningkatnya biaya tambahan. Oleh karena itu, hipotesis “uang pelicin” berlaku di sini.

c. Perpajakan

Restitusi PPN (*VAT Refunds*)

Dunia usaha telah lama mengeluh tentang keterlambatan dalam pengembalian PPN yang tentu saja keterlambatan tersebut bisa mempengaruhi kesehatan dan arus modal kerja perusahaan. Di samping itu, dunia usaha juga menganggap bahwa pengembalian itu lebih kecil dari yang diajukan. Survei ini mengindikasikan bahwa masalah restitusi PPN masih menjadi sumber terjadinya korupsi. Responden menyatakan bahwa rata-rata dibutuhkan waktu 6,3 bulan untuk mendapatkan restitusi PPN dan jumlah dana yang bisa diterima hanya 80,1 persen dari yang diajukan (diklaim). Dalam survei sebelumnya rata-rata waktu yang diperlukan 6 bulan atau lebih sedikit, sementara dana yang dikembalikan juga lebih besar (84,5 persen)

Waktu yang Diperlukan untuk Mengisi Formulir Pajak

Kalangan usaha kecil dan menengah mencatat bahwa sistem pencatatan pajak di Indonesia sangat kompleks dan banyak menghabiskan waktu. Setidaknya ada 7 jenis pajak yang harus diisi dan dikembalikan dalam tiap bulannya. Rata-rata perusahaan menghabiskan waktu 39 hari/orang untuk mengisi pajak bulanan, sedikit lebih rendah dari survei tahap kedua dan pertama yaitu 41 dan 44 hari/orang. Jika dibandingkan dengan negara lain, tentu saja hal ini cukup menyita waktu, oleh karena sebagian negara tidak menerapkan isian pajak bulanan, melainkan pajak tahunan.

Gambar 2. Rata-rata Waktu untuk Mengisi Formulir Pajak



d. Korupsi

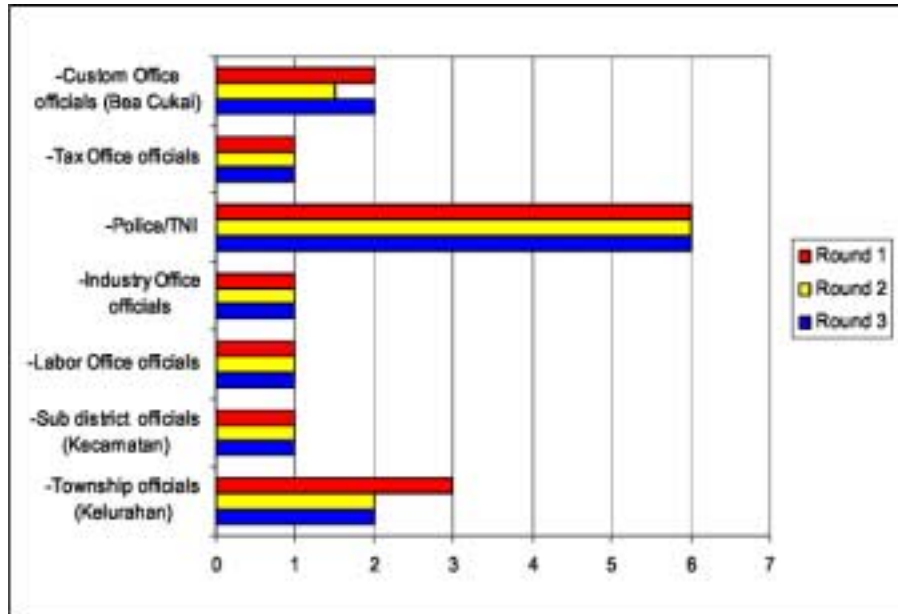
Suap dan persentase waktu manajer senior yang dihabiskan dengan aparat birokrasi
Dibanding dengan survei terdahulu, suap terhadap aparat pemerintah sebagai persentase dari biaya produksi sedikit menurun dari 1,8% menjadi 1,6%. Meski persentasenya kecil, tetapi jika di-rupiah-kan nilainya sangat besar. Sementara waktu manajer senior yang dihabiskan dengan petugas pemerintah adalah 5,9%.

Gangguan kunjungan aparat pemerintah

Indikator lain untuk melihat bagaimana birokrasi pemerintah bisa mempengaruhi iklim investasi adalah intensitas gangguan birokrasi. Pada survei tahap pertama dan kedua, gangguan birokrasi diukur dari frekuensi kunjungan oleh aparat birokrasi ke perusahaan. Demikian juga survei tahap ketiga, indikator frekuensi kunjungan tetap digunakan.

Seperti terlihat dalam gambar berikut ini, tidak ada perubahan yang signifikan dalam jumlah kunjungan yang dilakukan aparat birokrasi ke perusahaan dari survei tahap pertama, kedua dan ketiga. Berdasarkan nilai median, kunjungan terbanyak dilakukan oleh petugas kepolisian/aparat militer (6 kali), diikuti oleh petugas bea cukai, dan petugas kelurahan (masing-masing 2 kali).

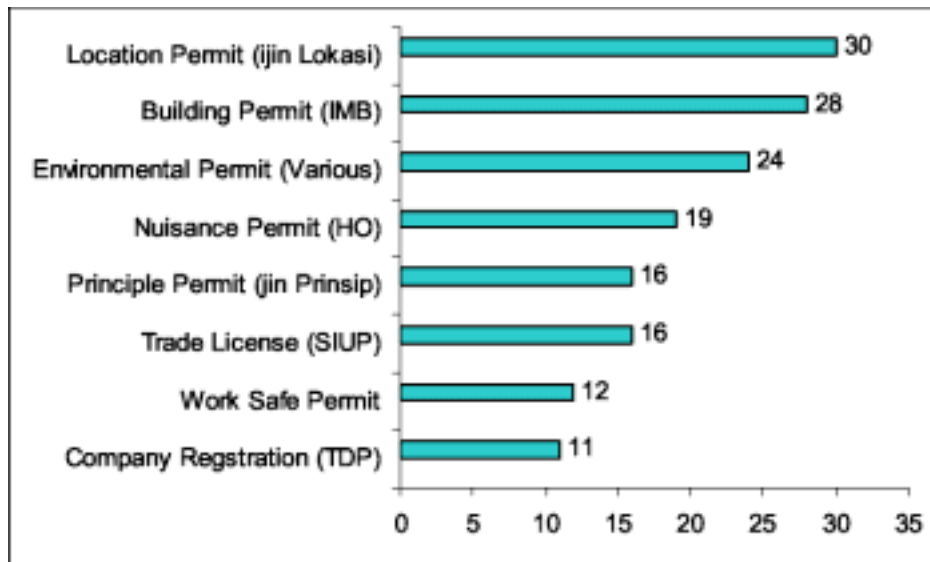
Gambar 3. Frekuensi Kunjungan oleh aparat pemerintah



e. Waktu (Hari) yang Diperlukan untuk Memperoleh Ijin Usaha

Untuk memulai bisnis di Indonesia, perusahaan pertama kali harus melengkapi registrasi perusahaan dari Menhukham, kemudian beberapa ijin yang bersifat “lokal”. Pada survei tahap ketiga, ada 10 ijin yang terpenting bagi perusahaan. Namun, hanya 8 ijin usaha yang dipenuhi oleh perusahaan pada survei tahap ketiga ini. **Gambar 4** berikut menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendapatkan ijin (dalam hari kerja). Pada 2006, rentang waktu untuk memperoleh ijin berkisar antara 11 hingga 28 hari kerja, sementara pada 2005 rentang waktunya 17 hingga 41 hari kerja. Waktu paling lama diperlukan untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan (IMB-28 hari), sedang waktu terpendek adalah untuk memperoleh ijin tanda daftar perusahaan (TDP-11 hari).

Gambar 4. Waktu (hari) yang Diperlukan untuk Memperoleh Ijin



Secara umum, waktu yang diperlukan untuk memperoleh ijin pada tahap ketiga (2006) adalah lebih cepat dibanding survei sebelumnya (2005).

f. Ketenagakerjaan

sementara itu, indikator ketenagakerjaan seperti peraturan ketenagakerjaan baik level pemerintah pusat maupun daerah, dan pendidikan/keterampilan tenaga kerja, juga memburuk, yang merefleksikan dampak *rigid*/kakunya pasar tenaga kerja di Indonesia dikaitkan dengan masalah biaya finansial perusahaan. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa terjadi kecenderungan menurunnya penggunaan tenaga kerja permanen pada perusahaan menengah dan besar.

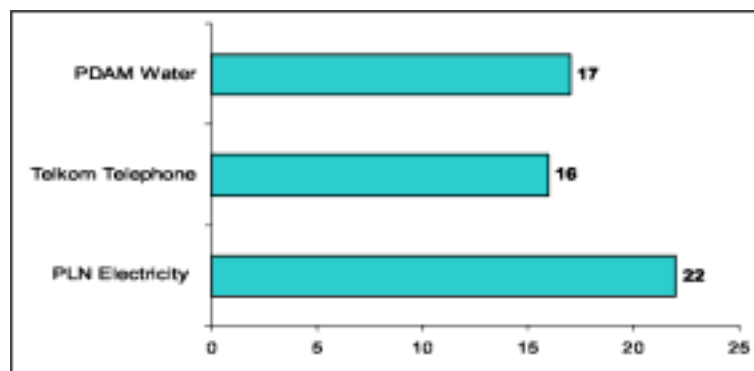
Hal yang paling memberatkan dunia usaha adalah masalah uang pesangon—dinyatakan oleh 28 persen responden, dan prosedur PHK—dinyatakan oleh 21 persen responden. Sementara itu, perusahaan yang mengalami persoalan terkait ketenagakerjaan meningkat pada survei saat ini dibanding survei terdahulu. Tuntutan kenaikan upah/gaji dan demonstrasi tenaga kerja sering dihadapi perusahaan. Diukur dari besaran biaya untuk menangani persoalan tenaga kerja, biaya pada survei tahap ketiga (2006) meingkat secara signifikan dibanding survei tahap kedua (2005), yaitu dari 3,7% (2005) menjadi 4,6% (2006).

g. Infrastruktur

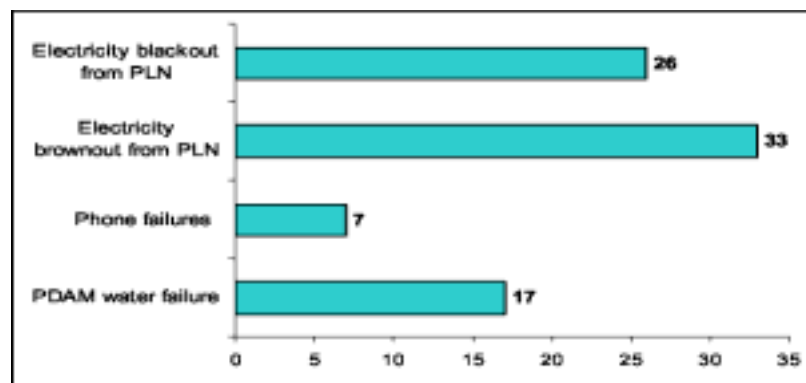
Survei tahap ketiga ini juga menanyakan kepada responden tentang kualitas infrastruktur. Dibandingkan dengan survei sebelumnya, diperlukan waktu lebih lama untuk memperoleh sambungan baru dari PLN atau peningkatan kapasitas, yaitu 22 hari atau 4 hari lebih lama dari survei tahap kedua. Sementara untuk sambungan PDAM dan telepon Telkom adalah 16 dan 17 hari, atau sedikit lebih lama dari survei sebelumnya. Namun, jika dilihat dari nilai median waktu untuk sambungan PLN, PDAM dan Telkom relatif tidak berubah.

Sementara itu, frekuensi terjadinya masalah dalam infrastruktur pada survei tahap ketiga, secara rata-rata memburuk jika dibanding survei sebelumnya.

Gambar 5. Waktu (hari) yang Diperlukan untuk Memperoleh Sambungan Baru atau Meningkatkan Kapasitas



Gambar 6. Frekuensi Terjadinya Masalah (rata-rata hari)



2. Kesimpulan

Secara keseluruhan, persepsi perusahaan dalam iklim investasi di Indonesia selama kurun satu semester terakhir (akhir 2005 hingga pertengahan 2006) untuk sebagian besar indikator makin menghambat dunia usaha. Hal ini berarti tekanan dalam perekonomian dari instabilitas nilai tukar, peningkatan inflasi dan tingkat suku bunga, dan peningkatan harga BBM hanya sedikit menjadi perhatian dunia usaha. Beberapa indikator mikroekonomi terkait dengan dunia usaha makin memburuk. Transportasi, listrik dan peraturan ketenagakerjaan dianggap makin menghambat jika dibanding survei sebelumnya.

Bagi usaha (perusahaan) baru, peraturan dan perijinan yang diperlukan untuk memulai suatu usaha sangat membingungkan dan inkonsisten antara satu ijin dengan ijin lainnya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar daerah. Seringkali, hal-hal tersebut berlebihan dan kompleks prosesnya. Pelurusan tentang syarat-syarat ijin yang diperlukan adalah sangat perlu jika ingin memperbaiki iklim bisnis di Indonesia. Tidak saja implementasi pelayanan satu atap, tetapi juga perlunya koordinasi antar instansi kementerian teknis yang membawahi pengeluaran ijin untuk menghindari tumpah tindih peraturan dalam pendaftaran usaha baru. Beberapa ijin yang sebenarnya memiliki kesamaan, sebaiknya digabungkan untuk mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan.

Tabel 1
Ringkasan , Perbandingan Hasil Survei Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3

NO	INDIKATOR	HASIL TAHAP 1 DIBANDING TAHAP 2	HASIL TAHAP 2 DIBANDING TAHAP 3
1	Memulai Usaha		
	Waktu (hari) yang diperlukan untuk memperoleh ijin "lokal"	Sedikit lebih baik (waktu lebih pendek)	Tidak berubah
2	Custom Clearance		
	Waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan barang melalui bea cukai	Sedikit lebih baik (waktu lebih pendek)	Lebih baik (waktu lebih pendek)
	"Biaya tambahan" untuk mempercepat proses <i>customs clearance</i>	Sedikit lebih baik (% biaya tambahan lebih rendah)	Lebih baik (% biaya tambahan lebih rendah)
3	Waktu dan Biaya untuk Memperoleh Restitusi PPN		
	Waktu untuk memperoleh restitusi PPN	Lebih baik (waktu lebih pendek)	Lebih buruk (waktu lebih lama)
	Jumlah restitusi PPN sebagai % dari yang diajukan (klaim)	Lebih baik (jumlah pengembalian PPN lebih besar)	Lebih buruk (jumlah pengembalian PPN lebih sedikit)
	"Biaya tambahan" untuk memperoleh restitusi PPN	Tidak berubah	Tidak berubah
4	Waktu yang Diperlukan untuk Mengisi Formulir Pajak Bulanan	Sedikit lebih baik (waktu lebih pendek)	Sedikit lebih baik (waktu lebih pendek)
5	Tenaga Kerja		
	Pesangon	Tidak berubah	Lebih buruk
	Sengketa tenaga kerja	Tidak berubah	Lebih buruk
6	Infrastruktur		
	Waktu untuk memperoleh sambungan fasilitas publik	Sedikit lebih baik (waktu lebih pendek)	Tidak berubah
	Frekuensi muncul masalah Listrik	Sedikit lebih baik (lebih sedikit masalah/gagal)	Lebih buruk (lebih sering bermasalah dan lebih lama)
	Frekuensi muncul masalah Telepon	Lebih buruk (lebih sering bermasalah)	Tidak berubah
	Frekuensi masalah dalam kualitas air	Lebih baik (lebih sedikit muncul masalah)	Tidak berubah



NO	INDIKATOR	HASIL TAHAP 1 DIBANDING TAHAP 2	HASIL TAHAP 2 DIBANDING TAHAP 3
7	Variabel-variabel Korupsi		
	Suap sebagai % dari biaya Produksi	Tidak berubah	Tidak berubah
	Waktu yang dihabiskan manajer senior dengan Aparat birokrasi	Lebih buruk (lebih banyak waktu yang dihabiskan)	Tidak berubah
	Gangguan: jumlah kunjungan aparat pemerintah ke perusahaan	Tidak berubah	Tidak berubah